



Laporan Hasil Survei
**KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2025

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2025

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A LATAR BELAKANG

Aparatur pemerintah memiliki peran pelayanan publik yang mesti dilaksanakan secara optimal (Wahyudianto, 2015), agar masyarakat dapat merasakan asas keadilan melalui kegiatan pelayanan publik. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya melayani masyarakat.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan, sehingga pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publiknya melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan meningkatkan *image* organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat meningkat. Meningkatnya citra organisasi dalam hal ini pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana hal ini menjadi salah satu tujuan utama dari pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepuasan masyarakat atas pelayanan aparaturnya merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan, ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dapat tercapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Pemerintah telah merespon tuntutan pentingnya pencapaian kepuasan masyarakat dalam setiap pelayanan publik dengan menetapkan tahun 2004 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kepuasan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, pemberi pelayanan perlu melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat pelayanan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan No. 14 Tahun 2007) yang mengamanahkan pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat guna peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Implementasi regulasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara berkala. Pada Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, diharapkan diperoleh data kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini menjadi keharusan guna memperbaiki kinerja pemerintahan dan meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pemerintahnya sehingga partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat pula.

B MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat pelayanan publik di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Perangkat Daerah secara berkala. Kemudian adapun tujuan dari survei ini adalah :

1. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C SASARAN

Survei ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D MANFAAT

Dengan dilakukannya survei kepuasan masyarakat, diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dari masing-masing bidang lingkup perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan dan upaya yang perlu dilakukan guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pada masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan unit pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja pelayanan masyarakat pada masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

E RUANG LINGKUP

Kegiatan survei penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik ini dilakukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Responden yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Instansi atau perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada masyarakat (*stakeholder*). Adapun ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan No. 14 Tahun 20017) meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; Sarana dan prasarana.

Pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat atau pelanggan untuk melihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdiri dari 9 unsur pertanyaan yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia.

F METODE PENELITIAN

1 Bahan Survei

a. Kuesioner

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik digunakan daftar pertanyaan (*kuesioner*) sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penyusunan *kuesioner* disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan. Bentuk *kuesioner* terlampir (Lampiran I) pada lampiran ini.

b. Bagian Kuesioner

Kuesioner terbagi atas tiga bagian, pertama berisikan judul *kuesioner* dan nama instansi yang dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Bagian *kedua* berisi identitas diri responden dengan jaminan kerahasiaan identitas. Bagian *ketiga* berisi pertanyaan *kuesioner* yang meminta pendapat responden terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan unit pelayanan atau perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur

pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 kategori, misal:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3; dan
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

2 Sampel dan Teknik Sampling

Penarikan sampel disesuaikan dengan jumlah populasi harian yang mendapat pelayanan publik di perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agar responden yang dipilih tepat sasaran sehingga terhindar dari bias, maka responden yang dipilih berdasarkan masyarakat yang telah mendapat pelayanan publik di unit pelayanan (*incidental sampling*) selama waktu pelaksanaan survei sesuai waktu yang telah ditetapkan. Adapun besaran sampel menggunakan tabel sampel Krejcie dan Morgan dengan jumlah minimal populasi masing-masing perangkat daerah adalah sepuluh.

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah pengisian kuesioner sendiri oleh responden serta wawancara tatap muka untuk memperoleh data analisis seperti kritik dan saran dari responden terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan masing-masing perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4 Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data meliputi:

- Data isian jawaban kuesioner melalui *google form* dan manual dimasukkan dalam satu *file* ke dalam *microsoft excel*;
- Proses *coding* jawaban kuesioner dari data respons kualitatif menjadi data kuantitatif;
- Menganalisis hasil *coding* angka jawaban kuesioner dengan statistik deskriptif dan inferensial; dan
- Analisis SKM dan IKM

G ANALISIS DATA DAN LAPORAN HASIL PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Hasil respons dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus: Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur = $1/9 = 0,11$.

Kemudian, untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan, digunakan pendekatan: $SKM = (\text{Total nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times 0,11$.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$.

Terakhir, untuk melihat Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

H HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

a. Deskripsi Responden

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melibatkan 47 responden yang datang dari latar belakang sosial yang beragam. Survei ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh dinas terkait, dengan memperhatikan aspek demografis dan pekerjaan responden agar tercipta gambaran yang komprehensif dan inklusif.

Jika dilihat dari distribusi jenis kelamin, responden survei ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 34 orang, sedangkan perempuan berjumlah 13 orang. Dominasi responden laki-laki menandakan bahwa partisipasi kaum pria dalam survei kepuasan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih cukup tinggi, meski keterlibatan perempuan juga tetap menunjukkan peran yang signifikan dalam proses penilaian layanan publik.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan strata satu (S1) dengan total 29 orang, sementara lulusan SMA sebanyak 18 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa survei IKM berhasil merangkul partisipasi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga harapan dan penilaian yang diberikan terhadap pelayanan publik didasari pada pemahaman yang baik terhadap proses dan kualitas layanan.

Jika ditinjau dari jenis pekerjaan, mayoritas responden berasal dari kalangan wirausaha sebanyak 39 orang. Selain itu, terdapat juga responden yang bekerja di sektor swasta sebanyak 7 orang dan honorer sebanyak 1 orang. Keberagaman profesi ini mencerminkan bahwa survei IKM tidak hanya melibatkan satu jenis pekerjaan saja, melainkan juga merangkul berbagai lapisan masyarakat yang berinteraksi dengan pelayanan publik, sehingga hasil survei menjadi lebih representatif.

Tabel. Responden SKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Total
Laki-laki	Perempuan	
34	13	47

Tabel. Responden SKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan		Total
SMA	S1	
18	29	47

Tabel. Responden SKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan			Total
Swasta	Wirausaha	Honorrer	
7	39	1	47

b. Evaluasi Unsur

Berdasarkan hasil survei terhadap unsur-unsur pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagian besar unsur memperoleh penilaian dalam kategori baik. Unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, serta sarana dan prasarana mendapatkan nilai rata-rata unsur (NRR) antara 3,17 hingga 3,38 dan masuk dalam kategori baik.

Unsur biaya/tarif, perilaku pelaksana, serta pengaduan, saran, dan masukan menonjol dengan nilai NRR masing-masing 3,87, 3,74, dan 4,00. Ketiga unsur tersebut masuk ke dalam kategori sangat baik, menunjukkan apresiasi tinggi dari masyarakat terhadap transparansi biaya, sikap pelaksana layanan, serta respons terhadap pengaduan atau masukan yang disampaikan. Pencapaian ini menjadi cerminan bahwa unit pelayanan dinas telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan

prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat.

Tabel. Evaluasi Unsur SKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,30	82,45	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,17	79,26	Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,19	79,79	Baik
U4	Biaya/tarif	3,87	96,81	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,38	84,57	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,36	84,04	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,74	93,62	Sangat Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,34	83,51	Baik
U9	Pengaduan, saran dan masukan	4,00	100,00	Sangat Baik

Berdasarkan analisis data, disarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pada aspek yang telah dinilai baik, sehingga ke depannya dapat mencapai kategori sangat baik secara menyeluruh. Upaya mempertahankan prestasi pada unsur biaya/tarif, perilaku pelaksana, serta pengaduan, saran, dan masukan perlu dioptimalkan sebagai teladan dalam pelayanan publik. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil rata-rata tertimbang unsur-unsur pelayanan, yaitu sebesar 3,45. Setelah dilakukan konversi, nilai tersebut menjadi 86,24 yang menempatkan kinerja unit pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kategori baik. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menilai bahwa layanan yang diberikan oleh dinas telah memenuhi harapan dan kebutuhan publik, serta mampu menjaga standar kualitas pelayanan secara konsisten.

Tabel. IKM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,30	0,36
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,17	0,35
U3	Waktu penyelesaian	3,19	0,35
U4	Biaya/tarif	3,87	0,43
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,38	0,37
U6	Kompetensi pelaksana	3,36	0,37
U7	Perilaku pelaksana	3,74	0,41
U8	Sarana dan prasarana	3,34	0,37
U9	Pengaduan, saran dan masukan	4,00	0,44
Nilai Indeks (NI)			3,45
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			86,24
Kinerja unit pelayanan			Baik

Jambi, Oktober 2025

Ketua Tim Peneliti,



Dr. Fridiyanto

Laporan Hasil Survei

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2025

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kinerja pelayanan publik harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu, pemerintah membangun sistem kinerja pelayanan yang baik dengan menyediakan standar pelayanan, prosedur pelayanan standar (SOP), survei kepuasan pelanggan, dan sistem pengelolaan pengaduan. Untuk menjawab tuntutan peningkatan kualitas kinerja pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di seluruh perangkat daerah dan kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelaksanaan survei itu mengacu pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik ini dilakukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Responden merupakan masyarakat pengguna layanan di seluruh perangkat daerah dan kecamatan yang dinilai mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat (stakeholders). Ruang lingkup survei mencakup sembilan unsur layanan, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana.



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)**
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jln. Jambi-Ma. Bulian Km. 16 Simpang Sungai
Duren Kab. Muaro Jambi, Jambi 36363



Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 182. Tungkal IV Desa
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Jambi 36514